

## GOVERNANCE VALUE CHAIN: PENGEMBANGAN WISATA TELUK PALU

Taufik

Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan  
email: [taufikadrianta@gmail.com](mailto:taufikadrianta@gmail.com)

### Abstract

*Insert to 2016, Indonesia and ASEAN member countries started with the new identity and era, namely as part of integrative community: ASEAN Community. The Community promises the complementary live. However, in the free trade today, togetherness was tinged dynamics that full competition. This matter makes Indonesian people have to compete in several sectors, include tourism. Development of local tourism into national and international leading destination is, to help the community's economy. Nevertheless, the local communities must be defending their values, cultures and local wisdom. The government plays an important role to increase the added value of tourist and creating strategies and marketing public relations to attract local and international tourist. In this context, unique of Palu city, Central Sulawesi is so potential to develop becomes international destination with steps and true strategies. With Tourism Global Value Chain concept and to see the government play, writer will analysis about potential, opportunities and challenges in value added Palu bay.*

**Keywords:** *Tourism, Palu Bay, Palu City, Global Value Chain*

### Abstrak

Memasuki tahun 2016 Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya memulai dengan identitas dan era yang baru, yakni sebagai bagian dari komunitas integratif: ASEAN Community. Komunitas ini menjanjikan hidup bersama yang komplementer. Namun, dalam era perdagangan bebas dewasa ini, kebersamaan tadi diwarnai dinamika yang penuh persaingan. Hal ini membuat masyarakat Indonesia harus ikut bersaing di berbagai sektor, termasuk pariwisata. Pengembangan pariwisata lokal menjadi destinasi unggulan nasional dan internasional untuk dapat membantu perekonomian masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat harus mempertahankan nilai, budaya dan kearifan lokal. Pemerintah berperan penting untuk meningkatkan nilai tambah destinasi wisata dan membuat strategi serta marketing public relations untuk menarik wisatawan lokal maupun internasional. Dalam konteks ini, keunikan kota Palu, Sulawesi Tengah sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata internasional dengan langkah dan strategi yang tepat. Dengan konsep Tourism Global Value Chain dan melihat peran serta pemerintah, penulis akan menganalisis tentang potensi, peluang dan tantangan dalam menambah nilai teluk Palu.

**Kata kunci:** *Pariwisata, Teluk Palu, Kota Palu, Global Value Chain*

### 1. Latar Belakang

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan suatu kerja sama regional untuk mengintegrasikan ekonomi negara-negara anggota ASEAN dalam satu komunitas bersama dengan sistem perdagangan yang bebas. Istilah MEA sendiri merupakan padanan dari ASEAN Economic Community (AEC), yang merupakan salah satu pilar penting dalam Komunitas ASEAN 2015. Dengan MEA, masyarakat Indonesia dituntut untuk kreatif dan siap dengan persaingan regional dan global.

Mewujudkan masyarakat ASEAN yang bersatu dan terintegrasi dalam satu payung komunitas ekonomi membutuhkan kesiapan penuh dari berbagai sektor. Hal ini disebabkan oleh semakin bebasnya perekonomian di seluruh kawasan ASEAN mulai tahun 2016 ini. Kesadaran para pemimpin negara ASEAN akan persaingan yang ketat di tingkat global, memaksakan para pemimpin ASEAN untuk menyepakati dan membantu rencana strategis dalam menciptakan terobosan/peluang pariwisata agar mampu bersaing dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks demikian, kerja sama ASEAN di sektor pariwisata tidak hanya sebatas pada kesepakatan para elit politik, tapi juga para pelaku bisnis, usaha kecil menengah, dan masyarakat secara holistik. Dengan demikian, kepala atau pemerintah daerah pun harus menyiapkan rencana strategis yang matang dalam menyikapi kesepakatan kerja sama yang telah ditetapkan, dalam hal ini termasuk pemerintah Palu.

Potensi wisata bahari dan alam Indonesia telah memberikan keuntungan tersendiri sebagai natural endowment yang harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tanpa harus meninggalkan kearifan lokal. Dalam konteks ini, kota Palu pun telah memiliki potensi alam atau natural endowment yang sangat unik. Dibutuhkan penangan yang tepat dari pemerintah dalam mengatur dan memanfaatkan potensi tersebut.

Teluk Palu dan pantai Talise merupakan *natural endowment* yang perlu dilestarikan dan dimanfaatkan agar dapat menjadi destinasi unggulan di ASEAN. Peran pemerintah lokal dalam mengembangkan dan membangun infrastruktur yang memadai menjadi sangat penting. Sehingga, promosi pun tidak hanya sebatas 'Visit Palu' atau 'Visit Sulteng' untuk nasional tapi juga untuk dunia. Dalam konteks ini, pemerintah dapat ikut memanfaatkan kerja sama regional dalam pembangunan dan promosi pariwisata.

Di sisi lain, pemanfaatan sektor pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, terutama sekitar teluk Palu dan pantai Talise, dibutuhkan *political will* dari pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan atau pun dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Sehingga, sangat penting bagi pemerintah meningkatkan mata rantai pariwisata teluk Palu dan pantai Talise menjadi destinasi wisata global.

Konsep *Global Value Chain* (GVC) dapat menjelaskan dan memperkenalkan bagaimana sektor ekonomi dan pembangunan lokal kota Palu khususnya teluk Palu dapat

menjadi kota tujuan wisata Internasional (*Go International*) seperti halnya wilayah lain di Sulawesi, Bhunaken di Manado, Sulawesi Utara dan Losari di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan dalam perkembangannya, *upgrading* yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Palu tidak hanya berhenti pada *functional upgrading* tapi juga *inter-sectoral upgrading*.

Melalui alat analisis GVC, penulis mencoba melihat lebih jauh bagaimana peran pemerintah kota Palu dalam membuat kebijakan untuk membangun sejumlah inovasi dan bahkan infrastruktur<sup>1</sup> agar menjadi tujuan pariwisata bertaraf internasional. Selain itu, GVC juga membantu dalam kegiatan bagaimana merancang, mengembangkan produk pariwisata, serta mempromosikan kepada dunia internasional.

Adapun pembahasan dalam artikel ini, terdiri dari urutan pembabakan berikut: (1) Konseptual *Value Chain* Pariwisata; (2) Hubungan Antara Pemerintah dan Pariwisata; (3) Potensi Wisata Kota Palu; (4) Analisis Nilai Tambah Teluk Palu; (5) Peluang dan tantangan pemerintah lokal dalam pengembangan wisata kota Palu dan teluk Palu.

## 2. Landasan Konseptual

Untuk mengkaji rantai nilai dari pariwisata teluk Palu, diperlukan seperangkat konsep sebagai alat analisis. Dalam konteks ini, penulis menggunakan konsep *value chain* serta pemerintah dan pariwisata.

### 2.1. *Value Chain* Pariwisata

Konsep *Value Chain* merupakan konsep yang mengacu pada bagaimana suatu perusahaan melakukan kegiatan produksi dengan cara efisien mulai dari desain, produksi produk, hingga pemasaran. *Global Value Chain* (GVC) merupakan sistem kegiatan ekonomi satu dengan kegiatan lainnya terhubung, sehingga tercipta mata rantai yang

<sup>1</sup> OECD, *Industry and Globalization Global Value Chain* (online), <<http://www.oecd.org/sti/ind/global-value-chains.htm>>, diakses 17 September 2013.

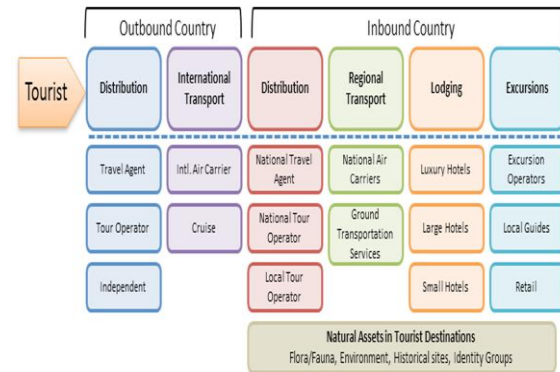
juga melibatkan peran dan andil pemerintah yang besar. Menurut Kaplinsky bahwa *value chain analysis* diperlukan untuk menjelaskan aktivitas-aktivitas yang ditentukan untuk membawa produk dan jasa dari awal produksi, termasuk kombinasi transformasi fisik dan masukan dari beberapa layanan produser, dan akhirnya sampai pada konsumen termasuk seluruh kegiatan dan proses penambahan nilai.<sup>2</sup> Disisi lain, analisis melalui perspektif GVC juga sangat berfungsi untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas untuk penambahan nilai yang lebih tinggi dan bagaimana pendapatan ekonomi mengalir dalam rantai produktif. Analisis GVC fokus pada sifat hubungan antara beberapa aktor yang terlibat dalam rantai tersebut dan implikasi terhadap mereka untuk pembangunan keberlanjutan dan daya saing.<sup>3</sup> Sedangkan disektor pariwisata analisis GVC berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana ekonomi pariwisata beroperasi.

*Value Chain* pariwisata meliputi beberapa aspek yang harus dipenuhi demi menunjang peningkatan pariwisata. Penunjang pariwisata sendiri dapat dilihat dari fasilitas dan infrastruktur yang disediakan. Sehingga, modal keindahan alam atau *natural endowment* saja tidak cukup untuk mengembangkan pariwisata daerah, khususnya pariwisata teluk Palu. Untuk membangun destinasi pariwisata yang unggul pun harus ada rantai nilai khusus dari gabungan antara jasa-jasa yang berkontribusi untuk menyampaikan produk pariwisata, baik organisasi formal ataupun informal seperti agen-agen perjalanan.

Menggambarkan GVC disektor pariwisata harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai aktor utama. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu menyediakan

infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk menunjang kenyamanan para wisatawan yang dapat dilihat dari skema.

Gambar 1. Rantai Nilai Global Pariwisata<sup>4</sup>



Untuk melakukan perjalanan wisata, wisatawan akan memastikan bahwa kebutuhan mereka selama berwisata terpenuhi. Dan ini harus berbanding lurus dengan penyedia layanan jasa pariwisata. *Pertama*, mencari produk pariwisata mana yang akan dipakai, dan biasanya *travel agent*, *travel operator* sebagai perantara distribusi utama. Biasanya mereka memberikan informasi mengenai transportasi, penginapan dan fasilitas yang mendukung darmawista. Dalam konteks ini, Untuk mendukung pariwisata teluk Palu penginapan disekitar teluk Palu telah ada dan sedang dikembangkan sebagai penunjang wisata, tidak hanya alam di teluk Palu tapi juga berbagai wisata kuliner.

*Kedua*, Mencari transportasi. Pada umumnya transportasi yang dipilih adalah angkutan udara (pesawat), namun disamping itu, moda pelayaran juga disukai dan populer dikalangan atas. Meskipun demikian, penerbangan atau pelayaran domestik juga harus tetap menyediakan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau. *Ketiga*, *Lodging* atau penginapan juga merupakan sarana yang mendukung dalam pariwisata. Dalam konteks ini, para wisatawan baik *inbound* ataupun

<sup>2</sup>F. Vignati, 'Value Chain Analysis As A Kick Off For Tourism Destination Development In Maputo City', Innovation News, <[http://www.hitt-initiative.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/Value-Chain-Analysis-as-a-Kick-for-Tourism-Destination-Development\\_final.pdf](http://www.hitt-initiative.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/Value-Chain-Analysis-as-a-Kick-for-Tourism-Destination-Development_final.pdf)>, diakses 14 Oktober 2013.

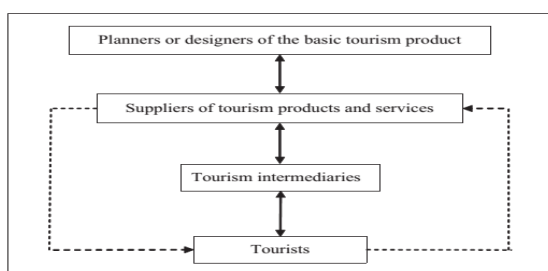
<sup>3</sup> F. Vignati, p. 4.

<sup>4</sup> M. Cristian, K.Fernandez-Stark, G. Ahmed & G. Gerrefi, *The Tourism Global Value Chain : Economic Upgrading and Workforce Development*, Duke CGGC, 2011, pp. 11-12.

outbound dapat menikmati fasilitas kamar yang sesuai dengan keinginan masing-masing. Keempat, Excursions merupakan perjalanan darwawisata di wilayah tujuannya dengan menikmati baik alam ataupun fasilitas penunjang wisata.

Di sisi lain, value chain pariwisata dapat dikategorikan dalam empat tingkatan, yakni; Pertama, perencanaan dan pendesain produk-produk pariwisata. Dalam hal ini, para pelaku bisnis ataupun pemerintah harus membuat kebijakan tentang perencanaan untuk meningkatkan mutu pariwisata yang berkaitan produk dan jasa pariwisata, seperti berbagai kegiatan yang menarik, akomodasi, pembangunan restoran, hotel, cafe, pusat souvenir, pusat informasi wisata dan lain sebagainya yang dibuat atau dioperasikan oleh baik pemerintah, investor asing ataupun domestik, maupun masyarakat lokal. Kedua, penyedia (supplier) barang dan jasa. Dalam hal ini, para penyedia produk dan jasa menyediakan produk-produk utama yang yang dibutuhkan oleh wisatawan. Ketiga, Perantara pariwisata, yang mana menjual produk dan jasa langsung diambil dari supplier. Keempat, wisatawan. (lihat gambar. 2).<sup>5</sup>

Gambar 2. Tipologi aktor dalam rantai nilai pariwisata<sup>6</sup>



Pariwisata menjadi salah satu strategi unggulan pemerintah di negara-negara berkembang dengan pemanfaatan sumber daya alam. Sehingga, penyediaan infrastruktur seperti yang ada dalam rantai nilai pariwisata dapat menguntungkan tidak hanya bagi

pemerintah tapi untuk masyarakat, dengan cara menyediakan produk ataupun jasa. Oleh sebab itu, sumber daya alam dan potensi saja tidak cukup, tapi harus diiringi dengan perencanaan dalam melakukan pembangunan.

## 2.2. Pemerintah dan Pariwisata

Terminologi pemerintah dan pariwisata merupakan dua hal yang berbeda dengan perkembangan ilmu yang luas dan komprehensif. Dalam mengembangkan wisata lokal menjadi destinasi unggulan kawasan dan global dibutuhkan strategi dan manajemen yang tepat. Dalam konteks ini, pemerintah berperan penting untuk menciptakan berbagai regulasi dan rencana strategis. James Elliot menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata, yakni dengan menyediakan stabilitas politik, keamanan, keabsahan, dan kerangka finansial yang dibutuhkan oleh wisatawan.<sup>7</sup>

Di sisi lain, pemerintah berperan penting dalam membuat berbagai regulasi atau kebijakan yang akan diimplementasikan demi meningkatkan sektor pariwisata yang menguntungkan tidak hanya bagi negara tapi juga bagi masyarakat lokal. Sehingga, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berkaitan pula dengan upaya pemerintah dalam penyediaan infrastruktur demi memperlancar arus perdagangan barang, jasa, dan wisatawan. Penyediaan infrastruktur fisik oleh pemerintah dapat berupa, jalan raya, jalur kereta, bandara, pelabuhan, mesin anjungan tunai mandiri (ATM) berbasis Visa, toilet di objek wisata dan lain sebagainya.

Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan juga dapat menjadi dimensi strategis dalam pembangunan ekonomi<sup>8</sup> dan mereduksi kemiskinan.<sup>9</sup> Pemerintah bertanggung jawab atas berbagai aktivitas,

<sup>5</sup> H. Song, J. Liu & G. Chen, *Tourism Value Chain Governance: Review and Prospects*, Journal of Travel Research 52 (1), 2012, p. 16.

<sup>6</sup> H. Song, J. Liu & G. Chen, p. 16.

<sup>7</sup> J. Elliot, *Tourism: Politics and Public Sectors Management*, Routledge, Londong, 1997, p. 2.

<sup>8</sup> N. Vanhove, *The Economics of Tourism Destinations*, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford, 2005, p. 170.

<sup>9</sup> A. Pleumarom, *The Politics of Tourism, Poverty Reduction and Sustainable Development*, Third World Network, Penang, 2012, p.7.

manajemen, dan pemberian pelayanan bagi wisatawan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan pariwisata dibutuhkan manajemen khusus yang disiapkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, Elliot juga menekankan beberapa hal penting terkait *Public Sector Management* demi perkembangan dan pembangunan pariwisata; (1) pemerintah dan peranannya, berkaitan dengan langkah dan upaya pemerintah untuk menjadikan destinasi wisata unggulan. (2) Pariwisata untuk pemerintah, berkaitan dengan pemanfaatan pariwisata untuk meningkatkan devisa negara atau daerah dan kesejahteraan rakyat. (3) Prinsip-prinsip dan tanggung jawab pemerintah dalam manajemen pariwisata seharusnya menjadi basis, berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah atas manajemen dan pengelolaan pariwisata dengan menjaga ideologi politik, negara dan kearifan lokal, sebagai keunikan tersendiri. (4) Perspektif internasional untuk pembangunan pariwisata, berkaitan dengan bagaimana pariwisata menjadi perspektif baru dalam meningkatkan perekonomian.<sup>10</sup>

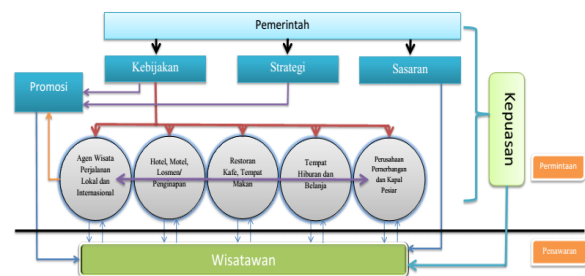
Perkembangan dan otonomi daerah, menjadikan pemerintah daerah dapat membuat rencana strategis sendiri. Oleh karena itu, pemerintah kota Palu berkomitmen dalam meningkatkan pariwisata lokal, terutama sepanjang teluk Palu atau bibir pantai menjadi destinasi unggulan dan mampu bersaing di pasar bebas ASEAN.

Pengembangan pariwisata lokal merupakan salah satu langkah untuk mengatasi kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena rantai perekonomian masyarakat bisa didorong dari keberadaan alam dan kearifan lokal. Mengingat besarnya kenutungan negara jika mengembangkan sektor pariwisata, maka pariwisata untuk mengatasi kemiskinan pun menjadi prioritas negara-negara berkembang. Pemanfaatan sektor pariwisata dianggap sebagai langkah yang tepat, sebab jika bersaing di bidang teknologi sangat kecil kemungkinan bagi negara berkembang bisa

menang melawan negara maju. Selain itu, pengembangan pariwisata dengan berbagai fasilitas infrastruktur dapat menarik wisatawan internasional dari negara-negara maju yang memiliki nilai mata uang yang lebih tinggi.

Dengan adanya wisatawan dari berbagai negara, negara tuan rumah atau penyedia wisata mendapatkan keuntungan dari pemasukan devisa dan menguntungkan bagi penyedia produk dan jasa lokal, baik itu restoran, kafe, penginapan, penjual souvenir, agen travel dan lain sebagainya. (lihat gambar 3)

Gambar 3. Rantai Konsumsi Wisatawan



### 3. Pembahasan

#### 3.1. Potensi Wisata Palu

Palu merupakan pusat pemerintahan dan juga sebagai pusat dari berbagai fungsi lain seperti pendidikan, kebudayaan, perekonomian, perdagangan, wisata dan sebagainya. Sehingga, Palu memerlukan berbagai fasilitas dan infrastruktur sebagai sarana prasarana yang dapat membantu kegiatan tersebut, termasuk kegiatan wisata. Dalam konteks wisata, kota Palu merupakan kota yang cukup unik dengan kekayaan alam dan kearifan lokal.

Ada empat potensi wisata kota Palu, yakni; *Pertama*, wisata budaya, etnis Kaili merupakan etnis asli dari masyarakat lembah Palu dengan berbagai kearifan lokal budaya, adat istiadat, kebiasaan dan bahasa yang perlu dilesartikan. Meskipun jarang ditemui dalam buku-buku sejarah nasional, wilayah lembah Palu merupakan wilayah kekuasaan dari beberapa kerajaan, seperti kerajaan Banawa, kerajaan Palu, kerajaan Tatanga, kerajaan

<sup>10</sup> J. Elliot, pp. 17-18.

Besusu, kerajaan Tawaeli dan kerajaan Parigi,<sup>11</sup> yang perlu diteliti lebih lanjut. Di sisi lain, di era globalisasi dan MEA, kebudayaan dari etnis kaili masih sangat kurang dan perlu dilestarikan. *Kedua*, wisata kuliner, dengan kearifan lokal budaya, Palu juga memiliki keunikan kuliner yang khas, seperti; kaledo, saraba, pisang epe, uve mpoi, uta kelo, uta dada dan lain sebagainya. Sehingga, di era MEA masyarakat lokal dapat didorong untuk mengembangkan berbagai kafe, rumah makan ataupun restoran beragaya modern tapi bercita rasa lokal.

*Ketiga*, wisata religi, yang mana Palu merupakan pusat dari organisasi keagamaan Al-Khairat. Al-khairat merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia Timur yang didirikan oleh Idrus Bin Al-Jufrie (Sis Al-Jufrie), atau dikenal sebagai Guru Tua. Laiknya Wali Songo yang menyebarkan islam di Pulau Jawa, makam Guru Tua pun banyak di kunjungi wisatawan dari berbagai daerah. Selain itu, masih ada beberapa objek wisata religi lainnya.<sup>12</sup> *Keempat*, wisata alam, kondisi topografi Palu yang unik menjadikan kota ini menjadi salah satu kota yang komplit dengan dimensi; (1) lautkeindahan laut yang menjorok ke daratan kota Palu; (2) sungai yang membelah kota yang berhulu dari danau Lindu di Taman Nasioanl Danau Lindu hingga hilir yang berada di pantai Talise; (3) jika dilihat dari udara dapat terlihat perpaduan alam bukit, pegunungan, gawalise dan lembah. Kondisi seperti ini pun menjadi potensi besar dalam mengembangkan pariwisata berbasis ekowisata.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Baca Selengkapnya dalam S.Djafar, *Kerajaan dan Dewan Adat di Tanah Kaili Sulawesi Tengah*, Ombak, Yogyakarta, 2014.

<sup>12</sup> Objek wisata religi di kota Palu, seperti: Masjid Agung Darussalam, Masjid Arkam Babu Rahman (Mesjid Apung) yakni mesjid yang dibangun di atas permukaan air di tepi pantai taman ria, Makam Abdul Raqi (Dato Karama) pengembang Islam pertama kali di kota Palu, Makam Sis Al-Jufrie (Guru Tua), dan lain sebagainya.

<sup>13</sup> Ekowisata merupakan wisata yang berbasis lingkungan atau alam yang mengutamakan konservasi lingkungan, sehingga keindahan alam tetap terjaga.

Pemerintah kota Palu, tentu dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan daya saing wisata alam atau ekowisata, termasuk bahari, yang dielaborasi dengan kearifan lokal. Dalam konteks ini, pemerintah dan masyarakat dapat memanfaatkan keindahan teluk Palu dengan membangun berbagai fasilitas, seperti toilet umum, tempat ibadah, hingga tempat berteduh dan infrastruktur lainnya yang mendukung dapat meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan internasional.

### 3.1.1. Teluk Palu: Prospek dan Peluang

Program transmigrasi oleh Pemerintah Pusat menjadikan kota Palu sebagai salah satu tujuan para transmigran dan pendatang dari berbagai daerah. Dengan ekonomi yang sederhana dan seadanya, para pendatang yang berbagai profesi kemudian membuat bangunan liar di sekitar pantai Talise. Kawasan ini pun menjadi semakin ramai, tidak hanya bangunan rumah semi permanen tapi juga warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman khas tanah Kaili<sup>14</sup> ini dari sore hingga dini hari. Oleh karena itu, kawasan yang seharusnya menjadi kawasan ekowisata dan ruang terbuka hijau tersebut menjadi kumuh. Di mana, sepanjang tahun 1990-an, teluk Palu menjadi kawasan yang kotor, kumuh dan rusaknya lingkungan dengan tercemarnya air laut, karena kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan.

Di sisi lain, kawasan sepanjang pantai Talise terkenal dengan lokalisasi pekerja seks komersial (PSK) dan warung “remang-remang”. Sehingga, pantai Talise pun menjadi objek wisata sex yang illegal.<sup>15</sup> Kondisi seperti ini menjadikan stigma negatif sepanjang kawasan pantai Talise dan juga bagi kawasan

<sup>14</sup> Kaili merupakan suku yang bermukim di lembah Palu meliputi kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi Biromaru, dan Kabupaten Parigi Moutong.

<sup>15</sup> A.M. Tombolotutu, ‘Pantai Talise Wisata di Tengah Kota’, *Harmoni dalam Keberagaman* (online), 9 September 2007, <<http://mulhanan.blogspot.co.id/2007/09/pantai-talise-wisata-di-tengah-kota.html>>, diakses 16 Januari 2016.

pantai-pantai lainnya di teluk Palu. Keresahan masyarakat dan pemerintah kota Palu mendorong otoritas kota Palu membuat kebijakan dengan melarang segala kegiatan yang bersifat asusila yang memperburuk citra pantai Talise. Dalam konteks ini, pemerintah merazia para PSK dan membina mereka di panti sosial Kalukubula.<sup>16</sup>

Disis lain, permasalahan bangunan dan rumah semi permanen sejak tahun 1986 sepanjang bibir pantai menjadi perhatian tersendiri bagi pencinta dan pemerhati lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tengah (Sulteng). Kerusakan dan pencemaran lingkungan ini tidak hanya bangunan dan rumah liar tapi juga perilaku masyarakat yang tinggal dilokasi tersebut sering membuang limbah rumah dan sampah langsung ke laut. Oleh karena itu, Walhi Sulteng berupaya mendorong pemerintah agar warga yang berada di sekitar pantai Talise tersebut direlokasi. Sehingga, pemerintah pun mengeluarkan surat keputusan tahun 2000 tentang penetapan kawasan bantaran sungai dan teluk Palu sebagai kawasan relokasi, yang mana relokasinya ke kelurahan Layana.<sup>17</sup> Upaya pemerintah untuk menjadikan kawasan terbuka hijau pun diimplementasikan sejak tanggal 31 Desember 2001, sebagai awal penggusuran. Di mana, warga korban relokasi pun dibina dan diberikan modal untuk memulai usaha.<sup>18</sup>

Potensi kota dengan dimenisi topografi yang unik sangat memungkinkan teluk Palu menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun internasional. Kawasan teluk Palu merupakan kawasan yang sangat prospektif untuk dijadikan ruang terbuka hijau, dan tempat rekreasi dalam kota.

Dalam konteks pengembangan, pemerintah kota Palu telah merancang dan

memulai pembangunan dengan membuat reklamasi pantai, lokalisir kafe-kafe di pinggir pantai, pembangunan anjungan dan lain sebagainya. Namun, ada beberapa hal yang perlu dan masih harus menjadi perhatian pemerintah lokal, berkaitan dengan infrastruktur dan fasilitas. Berdasarkan pengamatan penulis, pantai yang berada di teluk Palu (Talise, Kampung Nelayan dan Taman Ria) kekurangan fasilitas seperti lahan parkir bus pariwisata, toilet umum, ATM berbasis Visa dan *Master Card*, warung atau penjual souvenir, petugas kebersihan, petugas keamanan, pusat informasi wisatawan (*Tourist Informations Centre*), dan lain sebagainya. Sehingga, untuk menjadikan kota Palu dan teluk Palu menjadi destinasi unggulan di kawasan, memerlukan kesiapan dan ketegasan dari pemerintah dengan cara membuat langkah strategis pembangunan.

### 3.1.2. Governance dan Inovasi Penambahan Nilai Teluk Palu

Sebagai ibu kota propinsi, kota Palu termasuk salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Untuk mendukung program tersebut kawasan teluk Palu ditargetkan menjadi kawasan terbuka hijau dan objek pariwisata bahari. Adapun upayanya ialah dengan menambah nilai dari teluk Palu dengan cara meningkatkan mutu (*upgrading*). Dimana, *upgrading* mengarah pada peningkatan suatu produk atau suatu ekonomi untuk bergerak kesuatu hal yang lebih menguntungkan dan secara teknologi canggih dan menjadi tempat ekonomi padat karya. *Upgrading* dapat dijelaskan pada level pemerintah, perusahaan, dan individu potensial. Gereffi dan Fernandez-Stark menjelaskan ada empat tipe *upgrading* dalam melihat peningkatan mutu suatu produk;<sup>19</sup> *Pertama*, Proses *upgrading*, yaitu menggabungkan teknologi yang lebih canggih ke dalam produksi. Dalam konteks pariwisata, adanya koordinasi yang lebih baik antar

<sup>16</sup> A.M. Tombolotutu.

<sup>17</sup> Z. Batudoka, 'Place Attachment Pemukim Pascarelokasi di Kota Palu', Jurnal Mektek (online), <<https://jurnalmektek.files.wordpress.com/2012/04/8-zubair-butudoka-so-edit-januari-2005.pdf>>, diakses 16 Januari 2016.

<sup>18</sup> Z. Batudoka, pp. 59-60.

<sup>19</sup> G. Gereffi & K. Fernandez-Stark, *Global Value Chain: A Primer*, Center on Globalization, Governance & Competitiveness Duke University, Durham, 2011, pp. 12-13.

pemangku kepentingan, dan juga promosinya sudah mulai memanfaatkan media sosial, dan memberikan fasilitas berbasis teknologi. Dalam konteks ini, proses *upgrading* di sektor pariwisata adalah bagaimana akses menuju objek wisata dan ketersediaannya fasilitas canggih yang memudahkan wisatawan untuk menikmati liburan.

*Kedua*, produk *upgrading*, adanya panambah nilai dari produk yang dihasilkan. Produk *upgrading* dalam pariwisata dengan menyediakan kualitas servis yang bermutu, serta produk-produk terkait permintaan pasar, bahkan lebih kepada infrastruktur yang tersedia dalam menikmati objek pariwisata. *Ketiga*, fungsional *Upgrading*, merupakan inovasi dalam memperoleh fungsi baru untuk meningkatkan kandungan potensi yang ada secara keseluruhan. Di sektor pariwisata, objek wisata pantai dan bahari fungsi wisata tidak hanya satu tapi juga dimanfaatkan menjadi wisata kuliner, wisata belanja dan lain sebagainya. *Keempat*, *Inter-sectoral upgrading*, yakni dengan adanya sektor baru dalam sektor utama, seperti wisata bahari sebagai sektor utama dan industri perhotelan dengan berbagai inovasinya sebagai sektor tambahan.

Dalam upaya untuk meningkatkan pariwisata teluk Palu, Palu berupaya menambah dan mempertahankan nilai melalui pengembangan inovasi, pembangunan infrastruktur serta membuat festival sebagai daya tarik wisata budaya kota Palu. Beberapa upaya dan langkah pemerintah kota Palu dalam meningkatkan mutu pariwisata dan mempercantik kota, ialah; *Pertama*, renovasi dan perluasan bandara, sebagai penunjang pariwisata, pemerintah kota Palu berupaya dengan merenovasi, dan memperluas bandara Mutiara Palu sehingga dapat menampung lebih banyak penumpang. Bandara Mutiara pun berubah nama menjadi Bandara Mutiara Sis Al-Jufrie. Pemberian nama Sis Al-Jufrie merupakan penghormatan kepada mendiang atas jasa-jasanya dalam menyebarkan agama islam di tanah Kaili. Di sisi lain, perluasan bandara juga sebagai upaya dalam meningkatkan arus manusia, tidak hanya

berwisata tapi juga berbisnis, sekolah, dan lain sebagainya.

*Kedua*, relokasi warga dan pembangunan tanggul. Dalam hal ini, pemerintah kota Palu melakukan perelokasian warga sepanjang pantai Talise ke kelurahan Layana serta membangun tanggul pembatas air laut sepanjang bibir pantai, dimana pembangunan tanggul tersebut merupakan bantuan dari OECF-Jepang.<sup>20</sup> Tujuan utama pembangunan tanggul dan penggusuran adalah untuk menjaga kelestarian alam yang semakin rusak akibat pencemaran lingkungan dan abrasi akibat ombak. Keberhasilan dalam perelokasian warga berdampak pada kebersihan laut dan kenyamanan wisatawan dalam menikmati keindahan pantai sepanjang teluk Palu, sambil menikmati minuman dan makanan khas tanah Kaili.

*Ketiga*, Pembangunan hotel dan penginapan dekat pantai dengan fasilitas modern. Pembangunan tersebut merupakan salah satu upaya dan penunjang bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan teluk Palu. Selain itu, program pembangunan pemerintah lokal, kawasan teluk Palu dibangun *waterfront* dengan fasilitas publik. *Keempat*, Pembangunan Jembatan IV (warga lokal menyebutnya Jembatan Kuning), jembatan dengan panjang 300 meter yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2006. Seperti halnya jembatan-jembatan lain di berbagai kota di Indonesia, jembatan kuning merupakan jembatan lengkung pertama di Indonesia dan ketiga di dunia setelah Jepang dan Prancis.<sup>21</sup> Keindahan jembatan ini dapat dinikmati sepanjang pantai Talise, Taman Ria dan

<sup>20</sup>I. Sulaeman, 'Kerusakan dan Pencemaran Teluk Palu', *Stop Reklamasi (online)*, 22 Agustus 2010, <<http://iwansuleman.blogspot.com/2010/08/kerusakan-dan-pencemaran-teluk-palu.html>>, diakses 19 Januari 2016.

<sup>21</sup>M. Taufan SB, 'Jembatan Palu IV, Primadona Masyarakat Sulawesi Tengah', *Liputan 6 (online)*, 11 Juni 2014, <<http://lifestyle.liputan6.com/read/2061542/jembatan-palu-iv-primadona-masyarakat-sulawesi-tengah>>, diakses 19 Januari 2016.



Kampung Nelayan, bahkan dari udara, seperti saat pesawat akan mendarat, paralayang dan lain sebagainya.

*Kelima*, Wisata Kuliner. Untuk menambah khazanah teluk Palu, dilakukan *inter-sectaral upgrading* melalui pemanfaatan dan pembangunan kafe dan rumah makan. Sehingga, teluk Palu tidak hanya objek wisata alam tapi juga objek wisata kuliner. Dalam konteks ini, pemerintah kota Palu menyediakan kafe-kafe yang disewakan kepada para pedagang (warga sekitar kawasan teluk Palu) sepanjang pantai Talise dan Taman Ria untuk menjual berbagai makanan dan minuman khas Kaili (pisang epe, jagung bakar, saraba, pisang goreng, putu kaili).

*Keenam*, Membuat Event, untuk menambah daya tarik Kota Palu dan wisata bahari teluk Palu, Pemerintah Kota Palu tiap tahun menyelenggarakan festival Teluk Palu sebagai rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Palu. Festival ini digelar dengan menampilkan adat istiadat dari berbagai wilayah tidak hanya di kota Palu tapi juga beberapa daerah di Indonesia, bahkan dalam festival digelar lomba berenang di teluk Palu. Selain itu, pantai Talise dijadikan sebagai puncak Hari Nusantara 2013. Bahkan perayaan puncak Sail Tomini 2015 pun sangat menguntungkan bagi kota Palu karena para tamu undangan dan sebagian besar pergi ke lokasi puncak Sail Tomini di pantai Kayubara, Parig Moutong, via Palu dan menginap di Palu.

Penambahan nilai teluk Palu terus diupayakan hingga menjadi wisata bahari yang membanggakan dan menjadi destinasi wisata internasional. Untuk meningkatkan mutu dan menambah nilai pariwisata sepanjang teluk Palu, pemerintah kota Palu melakukan pembenahan dan mengembangkan infrastruktur melalui pembangunan jangka panjang yang terdiri dari tiga bagian. Pembangunan kawasan teluk Palu, diupayakan oleh pemerintah lokal melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu dengan menggandeng

pihak swasta.<sup>22</sup> Pembangunan teluk Palu merupakan rancangan jangka panjang oleh pemerintah untuk menjadikan sepanjang pantai menjadi kawasan yang bernilai tinggi tidak hanya untuk taman terbuka hijau tapi juga sebagai andalan di sektor pariwisata alam, yang juga dinilai sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan aspek lingkungan.<sup>23</sup> Sehingga, rencana pembangunan *waterfront* di teluk Palu akan berdampak pada berbagai aspek yang menguntungkan berbagai pihak dan terus diupayakan untuk menjadi tujuan wisata internasional, melalui program pemerintah lokal tentang pembangunan segmen 1, 2 dan 3 (*Palu Bay Park* dengan konsep *Waterfront*) sepanjang teluk Palu akan menambah nilai dari teluk Palu.

Pembangunan *Palu Bay Park* dengan konsep *waterfront* ditargetkan memiliki ruang terbuka hijau dengan fasilitas rekreasi, hiburan dan olahraga. Di sisi lain, manfaat dari ruang terbuka hijau sepanjang teluk Palu dapat berfungsi ekologis dan pelindung sumberdaya penyanggah kehidupan manusia dan menjamin kehidupan habitat liar, serta sebagai arsitektural, sosial dan fungsi ekonomi. Dimana dalam satu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan dengan kebutuhan, kepentingan dan keberlanjutan kota.<sup>24</sup>

### 3.2. Peluang dan Tantangan

Dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan, peran pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah dituntut untuk lebih produktif dalam membuat kerangka legal dan kebijakan yang berpihak pada warga miskin (*pro poor sustainable*) di berbagai sektor ekonomi, termasuk industri pariwisata berkelanjutan. Keaktifan pemerintah pusat

<sup>22</sup> Bappeda & PM Kota Palu, *Laporan Akhir, Penyusunan Rencana Induk Kawasan Teluk Palu Tahun 2011*, Tidak Diterbitkan, p. I.1

<sup>23</sup> Pemkot Palu, *Peraturan Daerah Kota Palu No. 16 Tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030*, Tidak Diterbitkan, pp. 31-35.

<sup>24</sup> Bappeda & PM, p. IV-2.

dalam mempromosikan pariwisata Indonesia dengan slogan *Wonderful Indonesia* tidak akan berhasil jika pemerintah daerah sendiri tidak memanfaatkan dengan baik promosi tersebut. Dalam kontkes ini, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah lokal dalam membangun dan mengembangkan industri pariwisata yang *pro poor sustainable*.

Gambar 4. Alur *Governance*



Dalam konteks *political will*, pemerintah kota Palu harus memiliki keinginan kuat atau itikad baik untuk menciptakan kota menjadi kota wisata dengan berbagai potensi, termasuk menjadikan Palu *Clean, Safe dan Green*.<sup>25</sup> Sedangkan kebijakan merupakan implementasi dari itikad baik pemerintah, seperti membuat peraturan daerah tentang pengembangan teluk Palu. *Planning* merupakan rencana strategis yang dirancang pemerintah melalui tim khusus dan disahkan pada paripurna dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). *Implementations*, merupakan pengaplikasian dari rencana strategis yang harus dimonitoring secara simultan dan kontinyu agar tidak terjadi penyelewengan atau sesuatu yang dapat merugikan masyarakat. Dan *evaluation*, merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah apakah rencana strategis yang telah diaplikasikan berjalan dengan baik atau perlu berbagai perbaikan.

Dalam konteks ini, pemerintah kota Palu sedang melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan untuk mengembangkan teluk Palu, melalui pengembangan segmentasi Taman Ria, Talise dan Kampung Nelayan. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah lokal berkaitan dengan fasilitas dan dampak lingkungan. Berdasarkan perencanaan pemerintah,

<sup>25</sup> Palu *Clean, Safe dan Green* merupakan moto pemerintah kota Palu untuk menciptakan kota Palu yang bersih, aman dan rindang.

sepanjang pantai Talise dan Taman Ria diperuntukkan untuk Kawasan Strategis Aspek Lingkungan, seperti yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kota Palu Tentang Tata Ruang dan Tata Wilayah 2010-2030.<sup>26</sup>

Dengan potensi pariwisata yang besar diharapkan mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia baik wisata religi, alam, budaya maupun kuliner. Potensi tersebut terkadang kurang dikelola secara maksimal sehingga masyarakatlah yang memberdayakan potensi wisata secara swadaya, bahkan individu. Meskipun demikian, beberapa tahun belakangan pemerintah lokal telah menunjukkan respon positif terhadap sektor pariwisata dengan melakukan berbagai cara. Bahkan terjadi peningkatan jumlah wisatawan beberapa tahun terakhir.<sup>27</sup>

Dalam konteks pengembangan dan pembangunan destinasi wisata, pemerintah lokal memiliki tantangan tersendiri. Potensi alam, keunikan masakan dan kuliner, serta kearifan lokal yang dipadukan dalam *inter-sectoral upgrading* teluk Palu. Menurut pengamatan penulis, setidaknya ada empat hal yang menjadi tantangan menuju destinasi unggulan di Indonesia dan regional, di tengah arus globalisasi, liberalisasi ekonomi regional, dan masyarakat ekonomi ASEAN, yakni;

- (1). Pembangunan menyeluruh (infrastruktur, fasilitas publik dan akses); Sebagai kawasan KEK, Palu membutuhkan pembangunan yang holistik dan merata. Pembangunan yang merata juga akan berdampak pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, pemerintah kota Palu berperan dalam menyediakan berbagai fasilitas publik, baik bidang transportasi, infrastruktur fisik dan non-fisik dan lain sebagainya.
- (2). *Training and Human Resource Development*; Peningkatan wisatawan

<sup>26</sup> Pemkot Palu, p.57.

<sup>27</sup> Berdasarkan data dan rekap dari Dinas Pariwisata Kota Palu tentang Rekap Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing / Domestik, Jumlah Kamar, Pegawai, Dan Ruang Pertemuan 2011-2013.

tentunya harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM). Dalam konteks ini, pemerintah harus memberikan perhatian khusus dalam hal pemberdayaan masyarakat untuk ikut berperan serta dalam sektor pariwisata. Selain itu, harus ada pelatihan khusus atau pembekalan apa saja yang harus dilakukan dan disiapkan oleh para pelaku bisnis atau masyarakat yang ikut terlibat dalam industri wisata. Demi mempermudah, pemerintah harus mempersiapkan SDM yang berkualitas dan siap pakai di masa akan datang. Cara sederhana untuk meningkatkan SDM ialah: Menyediakan 'sekolah khusus pariwisata' yang nantinya mereka siap kerja dan terjun disektor jasa pariwisata; dan sekolah yang berfokus pada kesenian (misalnya sanggar budaya), yang nantinya wisata budaya dan seni akan menjadi daya tarik dan pelengkap potensi-potensi wisata lainnya.

- (3). Keamanan; Isu kemanan di Sulawesi Tengah mulai muncul ke publik bahkan dunia internasional, semenjak adanya kerusuhan besar tahun awal tahun 2000-an di Poso. Stigmada stereotipe sebagai daerah teroris, berdampak besar pula bagi isu keamanan di kota Palu. Dengan kondisi demikian, dibutuhkan strategi promosi dan *public relation* yang efektif untuk menghilangkan stereotipe, baik sebagai daerah teroris maupun daerah konflik<sup>28</sup>
- (4). Strategi Promosi, Strategi *Public Relations* dan Strategi *Marketing*; Untuk meningkatkan pengunjung, pemerintah harus melakukan promosi secara maksimal dan optimal dengan cara membuat brosur khusus yang berisi profil Kota Palu dan potensi pariwisata yang ada, disisi lain juga pemerintah kota Palu harus memiliki motto khusus untuk menarik wasatawan agar mau berkunjung ke kota Palu. Promosi dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Kota/Propinsi lain. Misal dengan cara meletakkan brosur di Bandara Internasional Hasanuddin, Makassar dan Samratulangi, Manado yang selama ini sebagai kota di pulau Sulawesi yang banyak di kunjungi wisatawan asing. Selain itu, juga dapat bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Luar Negeri. Pada era globalisasi, promosi yang tidak kalah penting ialah melalui media elektronik maupun cetak.

#### 4. Kesimpulan

Pariwisata Kota Palu memiliki potensi yang besar, potensi tersebut dapat dibagi menjadi empat, yakni; wisata alam, religi, kuliner dan budaya. Seiring perkembangannya pariwisata semakin penting, sehingga pemerintah diharapkan mampu untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada.

Sebagai kota yang unik dengan keindahan alam, kearifan budaya lokal dan kekhasan kuliner, Palu sangat berpotensi untuk menjadi destinasi wisata regional dan internasional. Melalui *upgrading* dan menambah nilai, teluk Palu dapat dimanfaatkan tidak hanya sebagai objek wisata alam atau bahari tapi juga sebagai objek wisata kuliner dan budaya.

Pemerintah kota Palu berupaya untuk menambah nilai dari teluk Palu melalui pembangunan segmentasi sepanjang pantai Talise, Taman Ria, dan Kampung Nelayan dengan konsep *Waterfront*. Dengan konsep ini, dipreyeksikan kawasan ini memiliki fasilitas publik yang dibutuhkan wisatawan selama berlibur. Di samping itu, sepanjang kawasan ini juga di bangun berbagai restoran, hotel, toko souvenir dan lain sebagainya. Konsep ini membuktikan *upgrading* teluk Palu tidak lagi sebatas pada *fungsiional upgrading* tapi juga sudah mengarah *inter-sectoral upgrading* dimana wisatawan dapat menikmati berbagai fasilitas sambil menikmati indahnya pantai.

Meskipun demikian, pemerintah kota Palu masih memiliki berbagai tantangan yang

<sup>28</sup> Kota Palu memiliki historis konflik antarwarga dan kelurahan selama bertahun-tahun yang selama ini penyelesaiannya pasang surut, seperti konflik antarwarga di perbatasan kelurahan Nunu dan Tavanjuka.

harus dihadapi seperti: pembangunan fasilitas publik dan infrastruktur yang mempermudah arus perdagangan barang, jasa dan manusia; menyiapkan SDM yang berkualitas; menghilangkan stigma negatif tentang keamanan kota Palu dan Sulawesi Tengah; serta memiliki strategi promosi, *marketing* dan *public relations* demi menjadikan Palu dan Teluk Palu menjadi destinasi wisata internasional.

### Daftar Pustaka

- Bappeda & PM Kota Palu, 2012, "Laporan Akhir, Penyusunan Rencana Induk Kawasan Teluk Palu Tahun 2011", Tidak Diterbitkan.
- Batudoka, Z. 2012. "Place Attachment Pemukim Pascarelokasi di Kota Palu" <https://jurnalmektek.files.wordpress.com/2012/04/8-zubair-butudoka-so-edit-januari-2005.pdf>, diakses 16 Januari 2016.
- Cristian, M. K. Fernandez-Stark, Ahmed, G. & Gerrefi, G. 2011. "The Tourism Global Value Chain : Economic Upgrading and Workforce Development", Duke CGGC, 2011.
- Dinas Pariwisata Kota Palu tentang Rekap Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing / Domestik, Jumlah Kamar, Pegawai, Dan Ruang Pertemuan 2011-2013.
- Djafar, S. 2014. "Kerajaan dan Dewan Adat di Tanah Kaili Sulawesi Tengah", Yogyakarta: Ombak.
- Elliot, J. 1997. "Tourism: Politics and Public Sectors Management", London: Routledge.
- Gereffi, G. & Fernandez-Stark, K. 2011. "Global Value Chain: A Primer, Center on Globalization", Durham: Governance & Competitiveness Duke University.
- OECD, "Industry and Globalization Global Value Chain", <<http://www.oecd.org/sti/ind/global-value-chains.htm>>, diakses 17 September 2013.
- Pemda Propinsi Sulawesi Tengah, [http://sulteng.go.id/pub3/index.php?option=com\\_content&view=article&id=128](http://sulteng.go.id/pub3/index.php?option=com_content&view=article&id=128) &Itemid=144, diakses 14 September 2013.
- Pemkot Palu, "Peraturan Daerah Kota Palu No. 16 Tentang Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030", Tidak Diterbitkan.
- Pleumarom, A. 2012. "The Politics of Tourism, Poverty Reduction and Sustainable Development", Penang: Third World Network.
- Song, H., Liu, J. & Chen, G. 2012. "Tourism Value Chain Governance: Review and Prospects", *Journal of Travel Research* 52 (1), Halaman: 15-27
- Sulaeman, I. 2010. "Kerusakan dan Pencemaran Teluk Palu", dalam <http://iwansuleman.blogspot.com/2010/08/kerusakan-dan-pencemaran-teluk-palu.html>, diakses 19 Januari 2016.
- Taufan SB, M. 2014. "Jembatan Palu IV, Primadona Masyarakat Sulawesi Tengah" dalam <http://lifestyle.liputan6.com/read/2061542/jembatan-palu-iv-primadona-masyarakat-sulawesi-tengah>, diakses 19 Januari 2016.
- Tombolotutu, A.M. 2007. "Pantai Talise Wisata di Tengah Kota" dalam <http://mulhanan.blogspot.co.id/2007/09/pantai-talise-wisata-di-tengah-kota.html>, diakses 16 Januari 2016.
- Vanhove, N. 2005. "The Economics of Tourism Destinations", Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
- Vignati, F. 2011. "Value Chain Analysis As A Kick Off For Tourism Destination Development In Maputo City" dalam [http://www.hitt-initiative.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/Value-Chain-Analysis-as-a-Kick-for-Tourism-Destination-Development\\_final.pdf](http://www.hitt-initiative.org/wp/wp-content/uploads/2011/10/Value-Chain-Analysis-as-a-Kick-for-Tourism-Destination-Development_final.pdf), diakses 14 Oktober 2013.